



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:
  - a. semula ..... Rp 2.682.185.884.679,52
  - b. bertambah..... Rp 84.237.386.520,10jumlah pendapatan daerah setelah perubahan ..... Rp 2.766.423.271.199,62
2. Belanja Daerah:
  - a. semula ..... Rp 2.800.885.085.871,00
  - b. bertambah..... Rp 298.544.751.726,77jumlah belanja daerah setelah perubahan..... Rp 3.099.429.837.597,77  
defisit setelah perubahan ..... Rp (333.006.566.398,15)
3. Pembiayaan Daerah:
  - a. penerimaan pembiayaan daerah:
    - 1) semula ..... Rp 172.294.201.191,48
    - 2) bertambah..... Rp 230.748.365.206,67jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan..... Rp 403.042.566.398,15



b. pengeluaran pembiayaan daerah:		
1) semula .....	Rp	53.595.000.000,00
2) bertambah .....	<u>Rp</u>	<u>16.441.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan.....	Rp	70.036.000.000,00
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan .....	Rp	333.006.566.398,15

## Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah:

1) semula .....	Rp	867.643.469.527,46
2) bertambah .....	<u>Rp</u>	<u>35.635.451.196,10</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan .....	Rp	903.278.920.723,56

b. dana perimbangan:

1) semula .....	Rp	1.411.921.108.000,00
2) berkurang .....	<u>Rp</u>	<u>(24.891.442.550,00)</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan .....	Rp	1.387.029.665.450,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1) semula .....	Rp	402.621.307.152,06
2) bertambah .....	<u>Rp</u>	<u>73.493.377.874,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan.....	Rp	476.114.685.026,06

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah:

1) semula .....	Rp	581.800.000.000,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>17.700.000.000,00</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan .....	Rp	599.500.000.000,00

b. retribusi daerah:

1) semula .....	Rp	43.669.694.250,00
2) bertambah .....	<u>Rp</u>	<u>4.395.059.400,00</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan.....	Rp	48.064.753.650,00



- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- |   |           |                           |
|---|-----------|---------------------------|
| 1) semula .....   | Rp        | 38.579.263.688,00         |
| 2) berkurang .....  | <u>Rp</u> | <u>(1.922.501.932,90)</u> |
| jumlah hasil pengelolaan<br>kekayaan daerah yang<br>dipisahkan setelah perubahan. | Rp        | 36.656.761.755,10         |
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
- |  |           |                          |
|--|-----------|--------------------------|
| 1) semula .....  | Rp        | 203.594.511.589,46       |
| 2) bertambah.....  | <u>Rp</u> | <u>15.462.893.729,00</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan<br>asli daerah yang sah setelah<br>perubahan ..... | Rp        | 219.057.405.318,46       |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- |  |           |                       |
|--|-----------|-----------------------|
| 1) semula .....  | Rp        | 50.014.153.000,00     |
| 2) bertambah.....  | <u>Rp</u> | <u>652.459.000,00</u> |
| jumlah dana bagi hasil<br>pajak/bagi hasil bukan pajak<br>setelah perubahan..... | Rp        | 50.666.612.000,00     |
- b. dana alokasi umum:
- |   |           |                      |
|---|-----------|----------------------|
| 1) semula .....                                     | Rp        | 1.026.081.409.000,00 |
| 2) bertambahberkurang .....                         | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>          |
| jumlah dana alokasi umum<br>setelah perubahan ..... | Rp        | 1.026.081.409.000,00 |
- c. dana alokasi khusus:
- |   |           |                            |
|---|-----------|----------------------------|
| 1) semula .....                                       | Rp        | 335.825.546.000,00         |
| 2) berkurang .....                                    | <u>Rp</u> | <u>(25.543.901.550,00)</u> |
| jumlah dana alokasi khusus<br>setelah perubahan ..... | Rp        | 310.281.644.450,00         |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. pendapatan hibah
- |   |           |                          |
|---|-----------|--------------------------|
| 1) semula .....                                   | Rp        | 6.654.102.299,00         |
| 2) bertambah .....                                | <u>Rp</u> | <u>72.665.000.000,00</u> |
| jumlah pendapatan hibah<br>setelah perubahan..... | Rp        | 79.319.102.299,00        |
- b. dana Darurat:
- |                    |           |             |
|--------------------|-----------|-------------|
| 1) semula .....    | Rp        | 0,00        |
| 2) bertambah ..... | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |



jumlah dana darurat setelah perubahan.....	Rp	0,00
c. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya:		
1) semula .....	Rp	225.084.687.853,06
2) berkurang .....	Rp	<u>(1.490.622.126,00)</u>
jumlah dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan.....	Rp	223.594.065.727,06
d. dana penyesuaian dan otonomi khusus:		
1) semula .....	Rp	170.882.517.000,00
2) bertambah.....	Rp	<u>0,00</u>
jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan .....	Rp	170.882.517.000,00
e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya:		
1) semula .....	Rp	0,00
2) bertambah.....	Rp	<u>2.319.000.000,00</u>
jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan.....	Rp	2.319.000.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung:
- |   |    |                          |
|---|----|--------------------------|
| 1) semula .....   | Rp | 1.506.722.610.960,00     |
| 2) bertambah.....   | Rp | <u>31.262.847.794,54</u> |
| jumlah belanja tidak<br>langsung setelah<br>perubahan ..... | Rp | 1.537.985.458.754,54     |
- b. belanja langsung:
- |  |    |                           |
|--|----|---------------------------|
| 1) semula .....                                    | Rp | 1.294.162.474.911,00      |
| 2) bertambah.....                                  | Rp | <u>267.281.903.932,23</u> |
| jumlah belanja langsung<br>setelah perubahan ..... | Rp | 1.561.444.378.843,23      |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:



a. belanja pegawai:		
1) semula .....	Rp	1.063.232.350.778,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>13.053.485.658,00</u>
jumlah belanja pegawai		
setelah perubahan .....	Rp	1.076.285.836.436,00
b. belanja bunga:		
1) Semula .....	Rp	1.870.801.224,00
2) bertambah/berkurang .....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga		
setelah perubahan .....	Rp	1.870.801.224,00
c. Belanja subsidi:		
1) semula .....	Rp	0,00
2) bertambah .....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah belanja subsidi		
setelah perubahan .....	Rp	0,00
d. belanja hibah:		
1) semula .....	Rp	68.669.600.000,00
2) berkurang .....	<u>Rp</u>	<u>(163.700.000,00)</u>
jumlah belanja hibah setelah		
perubahan .....	Rp	68.505.900.000,00
e. belanja bantuan sosial:		
1) semula .....	Rp	22.209.667.000,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>10.177.233.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial		
setelah perubahan .....	Rp	32.386.900.000,00
f. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah		
desa:		
1) semula .....	Rp	62.545.217.425,00
2) bertambah .....	<u>Rp</u>	<u>10.057.982.239,00</u>
jumlah belanja bagi hasil		
kepada provinsi/kabupaten/		
kota dan pemerintah desa		
setelah perubahan .....	Rp	72.603.199.664,00
g. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota,		
pemerintah desa dan partai politik :		
1) semula .....	Rp	268.544.031.154,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>2.709.010.000,00</u>



jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik setelah perubahan ....	Rp	271.253.041.154,00
h. belanja tidak terduga:		
1) semula .....	Rp	19.650.943.379,00
2) berkurang.....	<u>Rp</u>	<u>(4.571.163.102,46)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan .....	Rp	15.079.780.276,54
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. belanja pegawai		
1) semula .....	Rp	201.747.887.230,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>20.135.205.025,76</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan .....	Rp	221.883.092.255,76
b. belanja barang dan jasa:		
1) semula .....	Rp	670.931.907.256,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>113.150.318.757,68</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan .....	Rp	784.082.226.013,68
c. belanja modal:		
1) semula .....	Rp	421.482.680.425,00
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>133.996.380.148,79</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan .....	Rp	555.479.060.573,79

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:		
a. penerimaan pembiayaan daerah:		
1) semula .....	Rp	172.294.201.191,48
2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>230.748.365.206,67</u>
jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan .....	Rp	403.042.566.398,15
b. pengeluaran pembiayaan daerah:		
1) semula .....	Rp	53.595.000.000,00
2) bertambah .....	<u>Rp</u>	<u>16.441.000.000,00</u>





	jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan .....	Rp	70.036.000.000,00
(2)	Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya:		
	1) semula .....	Rp	172.294.201.191,48
	2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>230.748.365.206,67</u>
	jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan .....	Rp	403.042.566.398,15
b.	pencairan dana cadangan:		
	1) semula .....	Rp	0,00
	2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan .....	Rp	0,00
c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:		
	1) semula .....	Rp	0,00
	2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan.....	Rp	0,00
d.	penerimaan pinjaman daerah:		
	1) semula .....	Rp	0,00
	2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pinjaman daerah setelah perubahan .....	Rp	0,00
e.	penerimaan kembali pinjaman daerah:		
	1) semula .....	Rp	0,00
	2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah perubahan .....	Rp	0,00
f.	penerimaan piutang daerah:		
	1) semula .....	Rp	0,00
	2) bertambah.....	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan ....	Rp	0,00



(3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan:

1) semula ..... Rp 0,00

2) bertambah..... Rp 0,00

jumlah pembentukan dana

cadangan setelah

perubahan.....Rp 0,00

b. penyertaan modal/investasi pemerintah daerah:

1) semula ..... Rp 46.575.000.000,00

2) bertambah..... Rp 16.441.000.000,00

jumlah penyertaan modal/

investasi pemerintah daerah

setelah perubahan ..... Rp 63.016.000.000,00

c. pembayaran pokok utang:

1) semula ..... Rp 7.020.000.000,00

2) bertambah ..... Rp 0,00

jumlah pembayaran pokok

utang setelah perubahan .....Rp 7.020.000.000,00

d. pemberian pinjaman daerah:

1) semula ..... Rp 0,00

2) bertambah..... Rp 0,00

jumlah pemberian pinjaman

daerah setelah

perubahan.....Rp 0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal/Investasi Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 8 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: ( 15 , 38 /2019)

